

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemenuhan kebutuhan perusahaan menjadi faktor penting yang mempengaruhi produktivitas perusahaan. PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang penyedia jasa transportasi berbasis kereta api dan termasuk organisasi profit yang bertujuan mendapatkan keuntungan tentu sangat memperhatikan produktivitas dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil untuk keperluan operasionalnya. Pada dasarnya, untuk meningkatkan produktivitas, hal yang harus diperhatikan adalah efektivitas dan efisiensi (Sudiman, 2021).

Bagi PT KAI (Persero), pemenuhan kebutuhan tersebut merupakan bentuk dari pengeluaran kas yang berupa biaya. Pada perusahaan besar seperti PT KAI (Persero), nominal rupiah yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentu tidak sedikit. Oleh sebab itu, umumnya PT KAI (Persero) menyelenggarakan kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan usaha di atas Rp 50.000.000. Hal tersebut karena melalui pengadaan barang dan jasa dengan nilai pekerjaan yang besar dinilai lebih efektif dan efisien.

PT KAI (Persero) DAOP 8 Surabaya merupakan salah satu daerah operasi perkeretaapian dari PT KAI (Persero). Pengadaan barang dan jasa pada PT KAI (Persero) DAOP 8 Surabaya dibedakan berdasarkan nilai pekerjaan, dimana pengadaan dengan nilai pekerjaan di bawah atau sama dengan Rp 500.000.000 metode pengadaan yang digunakan adalah penunjukan langsung dan pemilihan

langsung. Sementara itu, pengadaan dengan nilai pekerjaan di atas Rp 500.000.000 metode yang digunakan adalah penunjukan langsung dan pelelangan terbuka. Hal tersebut menunjukkan bahwa metode penunjukan langsung dapat digunakan baik untuk nilai pekerjaan di bawah maupun di atas Rp 500.000.000.

Pada proses pengadaan barang dan jasa, PT KAI (Persero) DAOP 8 Surabaya berperan sebagai pengguna sedangkan vendor berperan sebagai penyedia. Apabila PT KAI (Persero) DAOP 8 Surabaya telah menetapkan pihak penyedia, maka selanjutnya pengguna dan penyedia melakukan perjanjian atau kontrak terkait pengadaan barang dan jasa. Menurut Saija (2019:9), kontrak adalah dua atau lebih pihak yang melakukan suatu tindakan, dimana pihak yang terkait diwajibkan melakukan satu atau lebih prestasi. Setelah dilakukan serah terima pekerjaan, maka muncul tagihan pekerjaan yang diajukan oleh pihak penyedia/vendor (Felina, 2016). Sederhananya, tagihan yang diajukan oleh vendor kepada pengguna merupakan utang atau kewajiban yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Manajemen keuangan pada PT KAI (Persero) DAOP 8 Surabaya menerapkan sistem perbendaharaan, dimana pembayaran tagihan vendor ke rekening vendor dilakukan oleh Kantor Pusat dan PT KAI (Persero) DAOP 8 hanya sebatas memeriksa kelengkapan administrasi. Demi menunjang kelancaran proses pembayaran, terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus dipatuhi oleh setiap fungsi yang terkait. Menurut Sailendra (2015:37), SOP merupakan pedoman proses kerja yang harus dilakukan oleh pihak terkait di perusahaan serta sebagai pedoman dalam mengukur hasil kerja yang ingin dicapai perusahaan.

Pengajuan permintaan pembayaran ke Kantor Pusat dilakukan oleh Bagian Keuangan berdasarkan permohonan pembayaran dan berkas tagihan dari Unit terkait yang mengajukan permohonan pengadaan (*User*). Namun, sering kali berkas tagihan dari *User* tersebut terdapat beberapa dokumen yang tidak lengkap sehingga Bagian Keuangan mengembalikan dan meminta *User* untuk melengkapinya. Sementara itu, untuk mengetahui status pembayaran tagihan, PT KAI (Persero) DAOP 8 Surabaya dapat mengetahuinya dengan cara mengakses *System Applications and Product* (SAP) Perusahaan.

Pada SAP, keterangan pembayaran hanya menampilkan tanggal pembayaran (kliring) tanpa dilengkapi dengan bukti pembayaran. Apabila pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran terdapat vendor yang mengkonfirmasi bahwa dana belum dibayarkan, PT KAI (Persero) DAOP 8 Surabaya tidak dapat memberikan bukti pembayaran hanya mampu menyebutkan tanggal transaksi, sedangkan untuk meminta bukti pembayaran ke Kantor Pusat membutuhkan proses yang memakan waktu dan seringkali tidak mendapat tanggapan dari Kantor Pusat.

Melihat pentingnya prosedur yang tepat terkait pembayaran dana tagihan vendor untuk kemudahan dalam mengawasi dan mengendalikan pengeluaran kas, penulis tertarik untuk mengambil judul Tugas Akhir mengenai “Prosedur Pembayaran Tagihan Vendor Pengadaan Barang dan Jasa Metode Penunjukan Langsung PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya”. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi terkait prosedur pembayaran dana tagihan vendor pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya telah diuraikan, maka dapat diambil beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengajuan anggaran pengadaan barang dan jasa PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa metode penunjukan langsung PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya?
3. Bagaimana prosedur pembayaran tagihan vendor pengadaan barang jasa PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya?
4. Bagaimana pengenaan denda pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya?
5. Bagaimana hambatan pada prosedur pembayaran tagihan vendor pengadaan barang dan jasa PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan anggaran pengadaan barang dan jasa PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya.

2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa metode penunjukan langsung PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya.
3. Untuk mengetahui prosedur pembayaran tagihan vendor pengadaan barang dan jasa PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya.
4. Untuk mengetahui pengenaan denda pekerjaan pengadaan barang dan jasa PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya.
5. Untuk mengetahui hambatan pada prosedur pembayaran tagihan vendor pengadaan barang dan jasa PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berikut merupakan manfaat dari penelitian ini bagi beberapa pihak, diantaranya yaitu:

1. Bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi ilmu mengenai prosedur pembayaran serta dapat dijadikan sebagai pembandingan untuk kajian ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa UHW Perbanas Surabaya.
2. Bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya  
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi dan masukan terhadap proses pembayaran dana tagihan vendor perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja di bagian Keuangan perusahaan.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai referensi dan informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya khususnya mengenai prosedur pembayaran dana tagihan vendor.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan konsep dan teori dari beberapa ahli dan penelitian terdahulu yang mendasari dan mendukung penelitian.

### 3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan desain penelitian, batasan penelitian, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

### 4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat gambaran subyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan. Pada sub bab gambaran subyek penelitian akan diuraikan mengenai sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, tata nilai logo dan budaya perusahaan, struktur organisasi, *job description*, serta profil

usaha. Selanjutnya, pada sub bab hasil penelitian dan pembahasan memuat penjelasan mengenai prosedur pengajuan anggaran pengadaan barang dan jasa, prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa metode penunjukan langsung, prosedur pembayaran tagihan vendor pengadaan barang dan jasa, pengenaan denda pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta hambatan pada prosedur pembayaran tagihan vendor pengadaan barang dan jasa.

## 5. BAB V PENUTUP

Bab ini memuat simpulan, saran, dan implikasi penelitian. Saran ditujukan pada peneliti selanjutnya. Sementara itu, implikasi penelitian menguraikan masukan yang dapat diterapkan manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja perusahaan.